

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan ekuitas yang terdiri ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan
- b) menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d) menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

- e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya
- f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2011 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 meliputi hal-hal berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan OPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab III Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala Pencapaian Target

Bab IV Kebikakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD

- 5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD
 - 5.1.1 Pendapatan- LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pendapatan LO
 - 5.1.4 Beban
 - 5.1.5 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional
 - 5.1.6 Pos Luar Biasa
 - 5.1.7 Aset
 - 5.1.8 Kewajiban
 - 5.1.9 Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan OPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

Dalam dunia perekonomian kita pasti tidak asing dengan istilah dua teori ekonomi yang berpengaruh dalam jalannya perekonomian. Yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.

Pada dasarnya teori ekonomi makro adalah sebuah teori yang mempelajari dan membahas tentang segala peristiwa, fenomena atau masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup besar. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Karena pada dasarnya ekonomi makro memiliki tujuan ekonomi makro adalah untuk mengerti dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian dan berusaha untuk membuat suatu rumusan yang menjadi solusi untuk memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada. Selain itu dalam ekonomi makro ini ada beberapa hubungan yang terjadi. Hubungan yang dibahas di dalamnya meliputi hubungan antar variabel yang agregatif, adapun hubungan tersebut, antara lain :

1. Tingkat pendapatan nasional;
2. Konsumsi yang dilakukan rumah tangga;
3. Investasi nasional (pemerintah atau swasta);
4. Tingkat tabungan (institusi atau individu);
5. Belanja pemerintah (APBN atau APBD);
6. Tingkat harga (harga umum atau harga pasar);
7. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat;
8. Tingkat bunga yang didapat;
9. Kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan;
10. Neraca pembayaran;
11. Ekspor dan impor.

Itulah beberapa hubungan-hubungan yang dibahas dlm ekonomi mikro. Diharapkan dengan adanya ekonomi makro bisa menemukan segala permasalahan atau mencari solusi atau sebuah terobosan baru. Selain itu kita juga harus tahu ruang lingkup yang dimiliki oleh ekonomi makro, meliputi :

1. Bagaimana peran permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian;

- 2. Masalah-masalah besar yang sering menimpa perekonomian, antara lain inflasi, pengangguran, korupsi dan lainnya;
- 3. Peranana dari kebijakan, peraturan yang merupakan usaha pemerintah dalam mengatasi sebuah permasalahan perekonomian.

2.2. Kebijakan Keuangan

Berbagai kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat terkait erat dengan keuangan. Hubungan antara keuangan pemerintah dengan kegiatan perekonomian merupakan hubungan yang timbal balik atau dua arah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang perekonomian akan mempengaruhi keuangan negara. Sebaliknya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat.

Ditinjau dari 3 aspek objek belanja yaitu objek belanja pegawai, objek belanja barang dan jasa, dan objek belanja modal setelah dilakukan pengelompokan sesuai dengan rincian objeknya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2016 dan 2017
Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(dalam rupiah)

No	Objek Belanja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	8.015.518.875,00	7.320.787.559,00	8.780.300.057,00	7.755.477.974,00
2	Belanja Barang dan Jasa	6.652.039.000,00	6.204.472.840,00	5.798.379.645,00	5.284.362.688,00
3	Belanja Modal	713.790.000,00	685.469.700,00	1.769.188.155,00	1.476.274.613,00
JUMLAH		15.381.347.875,00	14.120.730.099,00	16.347.867.857,00	14.516.115.275,00

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa pagu anggaran mengalami kenaikan hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 pagu anggaran sebesar **Rp. 15.381.347.875,00** sedangkan pada tahun 2017 sebesar **Rp. 16.347.867.857,00**. Berdasarkan hal ini dapat diketahui adanya kenaikan anggaran sebesar **Rp. 966.519.982,00** .Kenaikan pagu anggaran tersebut tidak diikuti dengan tingkat capaian realisasi anggaran, dimana untuk tahun anggaran 2016 pada secara kumulatif realisasi anggaran **Rp. 14.120.730.099,00** atau **91.80 %**, sedangkan pada tahun anggaran 2017 capaian realisasi anggaran sebesar **Rp. 14.516.115.275,00** atau sebesar **88.80 %**.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja APBD pada OPD, berupa indikator program dan kegiatan OPD yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Untuk lebih jelas dengan indikator target kinerja belanja tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Target Kinerja Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
I	Belanja Pegawai	6.637.155.057,00
1.	Gaji dan Tunjangan	3.224.875.057,00
	- Gaji Pokok PNS/Uang Presentasi	2.408.922.000,00
	- Tunjangan Keluarga	203.346.800,00
	- Tunjangan Jabatan	184.990.000,00
	- Tunjangan Fungsional	80.730.000,00
	- Tunjangan Fungsional Umum	109.260.000,00
	- Tunjangan Beras	132.242.000,00
	- Tunjangan PPh/ Khusus	7.900.000,00
	- Pembulatan Gaji	82.000,00
	- Iuran Jaminan kesehatan BPJS Kesehatan	79.000.000,00
	-Iuran Jaminan Ketenaga kerjaan BPJS Ketenagakerjaan	. 18.402.257,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	3.412.280.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.903.000.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelengkapan Profesi	28.800.000,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	480.480.000,00

Sumber : DPPA Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rencana kerja tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 6 Program yang didukung oleh 39 Kegiatan. Mengenai indikator target

kinerja APBD Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2017 , terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dirinci perbidang disajikan pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Indikator Target Kinerja Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA KERJA		
		INDIKATOR	TOLAK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 9.775.000,00
		Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.590 Buah Materai dan Kegiatan Belanja Paket/ Pengiriman
		Hasil	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Diskominfo	12 Bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.890.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon dan internet berlangganan	12 bulan
		Hasil	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskominfo	1 tahun anggaran
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 373.350.000
		Keluaran	Terlaksananya Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Belanja BBM, Pembayaran STNK, Belanja Ban dan Accu Kendaraan	6 Unit Kendaraan Roda Empat, 13 Unit Kendaraan Roda Dua
		Hasil	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional yang baik	12 bulan
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 131.340.000
		Keluaran	Terlaksananya Pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan sebanyak 20 Orang	20 Orang Selama 12 bulan
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan

5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 18.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Belanja Peralatan Kebersihan Kantor	Peralatan Kebersihan selama 12 bulan
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 15.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Berupa Komputer, Laptop, Mesin Fotocopy, Printer, Telepon, dan Dispenser	10 Komputer, 11 Laptop, 1 Mesin Fotocopy, 6 Printer, 4 Telepon/ Fax, dan 4 Dispenser
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 93.800.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyediaan ATK	ATK selama 12 bulan
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 30.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja cetak dan belanja penggandaan selama 1 tahun
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 25.000.000
		Keluaran	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Belanja Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 394.530.000
		Keluaran	Terlaksananya penyediaan dan perlengkapan kantor berupa piring/gelas/mangkok/gorden ,komputer,notebook/laptop PC, kamera dan printer	penyediaan dan perlengkapan kantor berupa piring/gelas/mangkok/gorden ,komputer,notebook/laptop PC, kamera dan printer
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran diskominfo	12 Bulan
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Masukan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 40.000.000

		Keluaran	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar harian lokal dan nasional majalah komputer bulanan dan majalah mingguan nasional	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar harian lokal dan nasional, majalah komputer bulanan dan majalah mingguan nasional
		Hasil	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan informasi aparaturnya diskominfo	12 Bulan
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 11.000.000
		Keluaran	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor berupa isi air mineral dan isi ulang tabung gas	Air mineral isi ulang sebanyak 800 galon, obat-obatan 1 paket, dan isi ulang gas sebanyak 12 tabung selama 1 tahun
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 44.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran diskominfo	12 Bulan
14	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masukan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 200.000.000
		Keluaran	Terlaksananya rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah melalui perjalanan dinas	12 bulan
		Hasil	Terjalin koordinasi dinas antar daerah dengan baik	12 bulan
15	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	Masukan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 371.890.000
		Keluaran	Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	13 orang tenaga jasa penunjang administrasi perkantoran
		Hasil	Peningkatan Terhadap Perencanaan Pembangunan di Bidang Komunikasi dan	-
16	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
		Keluaran	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan
		Hasil	Terjalin koordinasi dinas antar daerah dengan baik	12 bulan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
17	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 187.000.000

		Keluaran	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 kendaraan operasional roda empat
		Hasil	Lancarnya operasional Diskominfo	12 Bulan
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 50.000.000
		Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan
		Hasil	Terjaganya dengan baik gedung kantor	12 Bulan
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 11.600.000
		Keluaran	pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas
		Hasil	Disiplin pegawai meningkat	12 bulan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA			
20	Pengelolaan dan operasional Jaringan Hotspot	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 335.710.000
		Keluaran	Terlaksananya operasional jaringan hotspot	12 titik di 6 kabupaten
		Hasil	Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi	12 titik di 6 kabupaten
21	Operasional Mobile Community Acces Point ke Kab/ Kota	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 145.088.000
		Keluaran	Terlaksananya Operasional Mobile Community Acces Point ke Kab/ Kota	4 Kali di Tiap Kab. di Pulau Bangka dan 2 Kali di Tiap Kab. di Pulau Belitung
		Hasil	Terwujudnya Upaya Pengentasan Kesenjangan Digital di Bangka Belitung	4 Kali di Tiap Kab. di Pulau Bangka dan 2 Kali di Tiap Kab. di Pulau Belitung
22	Pengelolaan Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 179.220.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah kepada public selama 1 tahun	7 Kab/ Kota

		Hasil	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 kali pemutaran film dan 20 kali konferensi pers serta 8 kali studi banding media dan koordinasi dengan media center daerah lain
23	Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 496.945.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyebarluasan InformasiProgram Pembangunan Daerah Melalui In Radio	7 Kab/ Kota
		Hasil	Terwujudnya Penyebarluasan InformasiProgram Pembangunan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Bulan
24	Pembinaan dan Pengawasan JARKOMSANDA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 94.050.000
		Keluaran	Terkalaksananya sosialisasi pengaman informasi dan komunikasi VIP dan monev jaring komunikasi sandi daerah provinsi kepulauan bangka belitung dengan pihak/dinas terkait	1 kali pelaksanaan sosialisai dan jarkomsanda ke 7 kabupaten/kota se – Provinsi kepulauan Bangka Belitung
		Hasil	Terwujudya pemahaman security awareness serta tergelarnya komunikasi sandi antar instansi di daerah provinsi kepulauan bangka belitung yang optimal	Meningkatkan security awareness aparatur. Raker teknis persandian serta Jarkomsanda dengan 17 pihak/dinas terkait
25	Penguatan Jaringan Komunikasi Data antar SKPD	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 387.070.000
		Keluaran	Tersedianya media akses komunikasi data di internal SKPD	45 paket
		Hasil	Meningkatnya layanan jaringan komunikasi data di Prov. Kep. Babel	45 paket
26	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Prov. Bangka Belitung MelaluiTVRI	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 498.058.000
		Keluaran	Terlaksanya penyebarluasan informasi program-program pembangunan daerah, edukasi dan hiburan kepada masyarakat melalui TVRI Bangka Belitung	Informasi pembangunan daerah Babel

		Hasil	Terwujudnya penyebarluasan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat	100%
27	Peningkatan Fungsi pelayanan KID Prov. Kep. Bangka Belitung	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 580.730.000
		Keluaran	Pelaksanaan tugas dan fungsi KID Prov. Babel dan sekretariat KID	7 Kabupaten/kota dan diluar prov kep. Babel
		Hasil	Terwujudnya transparansi informasi dan keterlibatan publik di babel	transparansi informasi dan keterlibatan publik di babel
28	Seleksi Anggota KID Prov. Kep. Babel	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 93.600.000
		Keluaran	Terseleksi Anggota KID	5 (lima) anggota KID
		Hasil	Terpenuhi seleksi Anggota KID periode 2017-2021	Terselenggara
29	Pengadaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah	Masukan	Ketersediaan Dana	Rp 185.720.000
		Keluaran	Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah	10 aplikasi
		Hasil	Tersedianya Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah di lingkungan pemerintah Prov. Kep. Babel	10 aplikasi
30	Pembangunan dan pengembangan Portal Prov. Kep. Babel	Masukan	jumlah Dana	Rp 81.500.000
		Keluaran	Bertambahnya jumlah Website pemerintah dan konten di Prov. Kep. Babel	40 portal
		Hasil	Tersedianya media informasi berbasis media website sbg sarana penyebarluasan informasi kpd masyarakat	40 portal
31	Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)	Masukan	jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp 444.830.000
		Keluaran	Tersedianya Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)	Uppgrade HDD 15 unit, upgrade RAM 10 unit, Cloud Core Router 8 unit
		Hasil	Keamanan dan Backup data penting Prov. Kep. Babel	Uppgrade HDD 15 unit, upgrade RAM 10 unit, Cloud Core Router 8 unit
32	Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Masukan	jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp 444.830.000

		Keluaran	Pelaksanaan tugas dan fungsi KPID daerah Prov. Kep. Babel dan sekretariat KPID	7 Kabupaten/kota dan diluar provinsi Kep. Babel
		Hasil	Terwujudnya fungsi penyiaran yang berkualitas di Babel	Fungsi penyiaran di Babel
	PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
33	Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Kehumasan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 49.495.000
		Keluaran	Tersedianya pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Bidang Komunikas	1 kali pelatihan 20 jam bagi aparatur pemerintah
		Hasil	Meningkatnya kualitas dan keterampilan Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dalam menolah informasi dan menyebarkan informasi serta kehumasan	75 orang aparatur pemprov dan pemkab/kota
34	Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 91.225.000
		Keluaran	Peningkatan kualitas dan kualitas SDM dalam mengelola pengembangan/pengelolaan website dan pengembangan aplikasi	50 peserta
		Hasil	Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK	50 peserta
35	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 183.030.000
		Keluaran	Terlaksananya Rakor KIM se Babel dan pertemuan KIM tingkat nasional	Terlaksananya Rakor KIM se Babel dan pertemuan KIM tingkat nasional
		Hasil	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi KIM sebagai agen informasi dan menjadikan KIM sbg media yang efektif dalam proses pembangunan	25 KIM berperan aktif dalam pembangunan
36	Penilaian Jabatan Fungsional Komputer	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 113.920.000
		Keluaran	Penetapan angka kredit PAK jabatan Fungsional Komputer (JFPK)	266 Aparatur Fungsional Komputer
		Hasil	Terlaksananya penilaian angka kredit PAK jabatan Fungsional Komputer	PAK JFPK prov dan Kab/kota

37	Penilaian Jabatan Pranata Humas	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 47.200.000
		Keluaran	Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Panata Humas	70 PAK aparatur Fungsional Panata Humas
		Hasil	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Panata Humas	2 x penilaian dala 1 tahun
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA			
38	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 218.050.000
		Keluaran	Terjalinnya kerjasama dalam penyebaran informasi daerah dan kegiatan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Koran dan Baleho	Media cetak
		Hasil	Terwujudnya penyebarluasan informasi daerah dan kegiatan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Beltung	25 kali terbit di media cetak
39	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 203.680.000
		Keluaran	Terjalinnya kerjasama dengan media elektronik dan media online	Kerjasama dengan media massa elektronik dan online
		Hasil	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Kegiatan Daerah Pemerinta Prov. Babel	2 kali tayang di TV, 2 kali di radio, dan berita online selama 1 tahun

Sumber : DPPA Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB III
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran merupakan alat untuk menilai kesuksesan pencapaian organisasi akan sasaran operasionalnya agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu apa yang telah dilakukan, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan.

Dalam konteks pencapaian target kinerja suatu program/kegiatan efisiensi (daya guna) sangat erat berhubungan dengan metode operasi (method operation). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tetentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah.

Sedangkan efektivitas (hasil guna) merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output.

Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktifitas dan kebijakan.

Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melihat perbandingan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentasi tingkat pencapaiannya. Sebagai gambaran atas realisasi pencapaian target kinerja *Belanja Tidak Langsung* pada unit kerja Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2017, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Belanja Pegawai	6.347.867.857,00	5.669.387.974,00	85.42	967.767.083,00	14.58
1.	Gaji dan Tunjangan	3.175.139.345,00	2.944.284.974,00	91.29	280.590.083,00	8.71
	Gaji Pokok	2.235.210.000,00	2.265.088.300,00	94.03	143.833.700,00	5.97
	Tunjangan Keluarga	313.784.800,00	191.472.559,00	99.16	11.874.241,00	0.84
	Tunjangan Jabatan	206.780.000,00	183.370.000,00	99.12	1.620.000,00	0.88
	Tunjangan Fungsional	105.980.000,00	51.890.000,00	64.28	28.840.000,00	35.72
	Tunjangan Fungsional Umum	66.850.000,00	56.145.000,00	51.39	53.115.000,00	48.61
	Tunjangan Beras	132.242.000,00	118.479.120,00	89.59	13.762.880,00	10.41
	Tunjangan PPh	7.900.000,00	4.064.316,00	51.45	3.835.684,00	48.55
	Pembulatan Gaji	82.000,00	27.182,00	33.15	54.818,00	66.85
	Iuran Jaminan Ketenaga kerjaan BPJS Ketenagakerjaan	28.310.545,00	10.442.797,00	56.75	7.959.460,00	43.25
	Iuran Asuransi Kesehatan	78.000.000,00	63.305.700,00	80.13	15.694.300,00	19.87
2.	Tambahan Penghasilan PNS	3.412.280.000,00	2.725.103.000,00	79.86	687.177.000,00	20.14
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.801.500.000,00	2.357.675.000,00	81.21	545.325.000,00	18.79
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	28.800.000,00	28.800.000,00	100	0	0
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	434.456.000,00	338.628.000,00	70.48	141.852.000,00	29.52

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Diskominfo Prov. Kep. Bangka Belitung

Dalam konteks realisasi anggaran *Belanja Langsung* pada unit kerja Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun Anggaran 2017 capaian target kinerja secara kuantitatif dapat dijelaskan sebagaimana tabel ini :

Tabel 3.2.
Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA KERJA		
		INDIKATOR	TOLAK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 9.775.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.590 Buah Materai dan Kegiatan Belanja Paket/ Pengiriman
		Hasil	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Diskominfo	12 Bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 1.890.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon dan internet berlangganan	12 bulan
		Hasil	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskominfo	1 tahun anggaran
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 373.350.000
		Keluaran	Terlaksananya Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Belanja BBM, Pembayaran STNK, Belanja Ban dan Accu Kendaraan	6 Unit Kendaraan Roda Empat, 13 Unit Kendaraan Roda Dua
		Hasil	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional yang baik	12 bulan
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 131.340.000
		Keluaran	Terlaksananya Pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan sebanyak 20 Orang	20 Orang Selama 12 bulan
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 18.000.000

		Keluaran	Terlaksananya Belanja Peralatan Kebersihan Kantor	Peralatan Kebersihan selama 12 bulan
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 15.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Berupa Komputer, Laptop, Mesin Fotocopy, Printer, Telepon, dan Dispenser	10 Komputer, 11 Laptop, 1 Mesin Fotocopy, 6 Printer, 4 Telepon/ Fax, dan 4 Dispenser
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 93.800.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyediaan ATK	ATK selama 12 bulan
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 30.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja cetak dan belanja penggandaan selama 1 tahun
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 25.000.000
		Keluaran	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Belanja Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 505.876.000
		Keluaran	Terlaksananya penyediaan dan perlengkapan kantor berupa piring/gelas/mangkok/gorden, komputer, notebook/laptop PC, kamera dan printer	Penyediaan dan perlengkapan kantor berupa piring/gelas/mangkok/gorden, komputer, notebook/laptop PC, kamera dan printer
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran diskominfo	12 Bulan
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Masukan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 40.000.000

		Keluaran	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar harian lokal dan nasional majalah komputer bulanan dan majalah mingguan nasioanl	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar harian lokal dan nasional, majalah komputer bulanan dan majalah mingguan nasional
		Hasil	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan informasi aparatur diskominfo	12 Bulan
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 11.000.000
		Keluaran	Tersedianya penyedian bahan logistic kantor berupa isi air mineral dan isi ulang tabung gas	Air mineral isi ulang sebanyak 800 galon, obat-obatan 1 paket, dan isi ulang gas sebanya 12 tabung selama 1 tahun
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran Diskominfo	12 Bulan
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 44.000.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan
		Hasil	Lancarnya aktivitas perkantoran diskominfo	12 Bulan
14	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masukan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 200.000.000
		Keluaran	Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah melalui perjalanan dinas	12 bulan
		Hasil	Terjalin koordinasi dinas antar daerah dengan baik	12 bulan
15	Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	Masukan	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp. 371.890.000
		Keluaran	Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	13 orang tenaga jasa penunjang administrasi perkantoran
		Hasil	Peningkatan Terhadap Perencanaan Pembangunan di Bidang Komunikasi dan	-
16	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Masukan	Jumlah Dan yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
		Keluaran	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan
		Hasil	Terjalin koordinasi dinas antar daerah dengan baik	12 bulan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
17	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 187.000.000

		Keluaran	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 kendaraan operasional roda empat
		Hasil	Lancarnya operasional Diskominfo	12 Bulan
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 50.000.000
		Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan
		Hasil	Terjaganya dengan baik gedung kantor	12 Bulan
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 11.600.000
		Keluaran	pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas
		Hasil	Disiplin pegawai meningkat	12 bulan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA			
20	Pengelolaan dan operasional Jaringan Hotspot	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 215.710.000
		Keluaran	Terlaksananya operasional jaringan hotspot	12 titik di 6 kabupaten
		Hasil	Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi	12 titik di 6 kabupaten
21	Operasional Mobile Community Acces Point ke Kab/ Kota	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 145.088.000
		Keluaran	Terlaksananya Operasional Mobile Community Acces Point ke Kab/ Kota	4 Kali di Tiap Kab. di Pulau Bangka dan 2 Kali di Tiap Kab. di Pulau Belitung
		Hasil	Terwujudnya Upaya Pengentasan Kesenjangan Digital di Bangka Belitung	4 Kali di Tiap Kab. di Pulau Bangka dan 2 Kali di Tiap Kab. di Pulau Belitung
22	Pengelolaan dan Operasional Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 169.220.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah kepada public selama 1 tahun	7 Kab/ Kota
		Hasil	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi	7 kali pemutaran film dan 20 kali konferensi pers serta 8 kali

			di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	studi banding media dan koordinasi dengan media center daerah lain
23	Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 496.945.000
		Keluaran	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Daerah Melalui In Radio	7 Kab/ Kota
		Hasil	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Bulan
24	Pembinaan dan Pengawasan JARKOMSANDA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 94.050.000
		Keluaran	Terkalaksananya sosialisasi pengaman informasi dan komunikasi VIP dan monev jaring komunikasi sandi daerah provinsi kepulauan bangka belitung dengan pihak/dinas terkait	1 kali pelaksanaan sosialisai dan jarkomsanda ke 7 kabupaten/kota se – Provinsi kepulauan Bangka belitung
		Hasil	Terwujudnya pemahaman security awareness serta tergelarnya komunikasi sandi antar instansi di daerah provinsi kepulauan bangka belitung yang optimal	Meningkatkan security awareness aparatur. Raker teknis persandian serta Jarkomsanda dengan 17 pihak/dinas terkait
25	Penguatan Jaringan Komunikasi Data antar SKPD	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 346.870.000
		Keluaran	Tersedianya media akses komunikasi data di internal SKPD	45 paket
		Hasil	Meningkatnya layanan jaringan komunikasi data di Prov. Kep. Babel	45 paket
26	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui TVRI	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 498.058.000
		Keluaran	Terlaksanya penyebarluasan informasi program-program pembangunan daerah, edukasi dan hiburan kepada masyarakat melalui TVRI Bangka Belitung	Informasi pembangunan daerah Babel
		Hasil	Terwujudnya penyebarluasan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat	100%
27	Peningkatan Fungsi pelayanan KID Prov. Kep. Bangka Belitung	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 580.730.000

		Keluaran	Pelaksanaan tugas dan fungsi KID Prov. Babel dan sekretariat KID	7 Kabupaten/kota dan diluar prov kep. Babel
		Hasil	Terwujudnya transparansi informasi dan keterlibatan publik di babel	transparansi informasi dan keterlibatan publik di babel
28	Seleksi Anggota KID Prov. Kep. Babel	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 84.600.000
		Keluaran	Terseleksi Anggota KID	5 (lima) anggota KID
		Hasil	Terpenuhi seleksi Anggota KID periode 2017-2021	Terselenggara
29	Pengadaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah	Masukan	Ketersediaan Dana	Rp 504.720.000
		keluaran	Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah	6 aplikasi
		Hasil	Tersedianya Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah di lingkungan pemerintah Prov. Kep. Babel	6 aplikasi
30	Pembangunan dan pengembangan Portal Prov. Kep. Babel	Masukan	jumlah Dana	Rp 81.500.000
		keluaran	Bertambahnya jumlah Website pemerintah dan konten di Prov. Kep. Babel	40 portal
		Hasil	Tersedianya media informasi berbasis media website sbg sarana penyebarluasan informasi kpd masyarakat	40 portal
31	Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)	Masukan	jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp 214.930.000
		keluaran	Tersedianya Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)	Uppgrade HDD 15 unit, upgrade RAM 10 unit, Cloud Core Router 8 unit
		Hasil	Keamanan dan Backup data penting Prov. Kep. Babel	Uppgrade HDD 15 unit, upgrade RAM 10 unit, Cloud Core Router 8 unit
32	Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Masukan	jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp 718.750.000
		keluaran	Pelaksanaan tugas dan fungsi KPID daerah Prov. Kep. Babel dan sekretariat KPID	7 Kabupaten/kota dan diluar provinsi Kep. Babel
		Hasil	Terwujudnya fungsi penyiaran yang berkualitas di Babel	Fungsi penyiaran di Babel
33	Implementasi Aplikasi Smart Citizen	Masukan	jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp 402.185.000
		keluaran	Tersedianya Tim Task Force yang akan memonitoring System Dashboard Smart Citizen di Prov dan 7 Kab/kota	Implementasi di Provinsi dan 7 Kabupaten /Kota
		Hasil	Tersedianya System Dashboard Smart Citizen dan Pemasangan Beacon pada tempat Strategis dan Ruang Publik	1 Paket System Dashboard Smart Citizen dan 1 paket pemasangan Beacon

	PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
34	Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 51.225.000
		Keluaran	Peningkatan kualitas dan kualitas SDM dalam mengelola pengembangan/pengelolaan website dan pengembangan aplikasi	50 peserta
		Hasil	Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK	50 peserta
35	Penilaian Jabatan Fungsional Komputer	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 59.570.000
		Keluaran	Penetapan angka kredit PAK jabatan Fungsional Komputer (JFPK)	266 Aparatur Fungsional Komputer
		Hasil	Terlaksananya penilaian angka kredit PAK jabatan Fungsional Komputer	PAK JFPK prov dan Kab/kota
36	Penilaian Jabatan Pranata Humas	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 8.664.845
		Keluaran	Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Panata Humas	70 PAK aparaturnya Fungsional Panata Humas
		Hasil	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Panata Humas	2 x penilaian dala 1 tahun
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA			
37	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 183.050.000
		Keluaran	Terjalannya kerjasama dalam penyebaran informasi daerah dan kegiatan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui media cetak, elektronik, maupun media daring/online	4 Media cetak, 1 media elektronik, 3 media online/daring
		Hasil	Terwujudnya penyebarluasan informasi daerah dan kegiatan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Beltung	10 media cetak, 15 kali media elektronik, 15 kali media online/daring
38	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 697.215.155
		Keluaran	Terjalannya kerjasama dengan media elektronik dan media online	2 kali di radio dan 1 kali di berita online selam 1 tahun, 20 kali pemasangan spanduk/baleho, 600 berita dibabelprov.go.id

		Hasil	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Kegiatan Daerah Pemerinta Prov. Babel	Kerjasama dengan media massa elektronik dan online, pemerintah dan pihak terkait
--	--	-------	---	--

Untuk melihat lebih rinci perbandingan antar kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, berikut disajikan tabel sisa anggaran khusus untuk Belanja Langsung sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2017

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.477.200,00	86.72
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.875.998.550,00	99.26
3	Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	311.879.438,00	83.50
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	126.450.000,00	96.28
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.894.500,00	99.41
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.100.000,00	67.33
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.735.000,00	99.93
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.780.000,00	89.27
9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	100
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	461.675.885,00	91.26
11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.960.000,00	99.9
12	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.777.000,00	97.97
13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	44.000.000,00	100
14	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	199.912.709,00	99.96
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	371.890.000,00	100
16	Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah	147.564.413,00	98.38

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
17	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	183.900.000,00	98.34
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	49.954.000,00	99.91
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		
19	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	11.600.000,00	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA		
20	Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot	194.817.335,00	90.31
21	Kegiatan Operasionalisasi Mobile Community Acces Point (M-CAP)	111.399.202,00	76.78
22	Kegiatan Pengelolaan Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	126.915.864,00	75.00
23	Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	471.809.027,00	94.94
24	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan JARKOMSANDA Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	84.154.740,00	89.48
25	Kegiatan Penguatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD	304.275.728,00	87.72
26	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Prov. Bangka Belitung Melalui TVRI	490.270.552,00	98.44
27	Kegiatan Peningkatan Fungsi pelayanan KID Prov. Kep. Bangka Belitung	556.551.273,00	95.84
28	Kegiatan Seleksi Anggota KID Prov. Kep. Babel	84.279.962,00	99.62
29	Pengadaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah	477.068.595,00	94.52
30	Pembangunan dan pengembangan Portal Prov. Kep. Babel	70.211.000,00	86.15
31	Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)	197.110.960,00	91.71
32	Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	704.341.427,00	97.99
33	Implementasi Aplikasi Smart Citizen	0	0
	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
34	Kegiatan Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK	49.123.540,00	95.90
35	Kegiatan Penilaian Jabatan Fungsional Komputer	30.298.504,00	50.86
36	Kegiatan Penilaian Jabatan Pranata Humas	8.664.845,00	93.77
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA		
37	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung melalui Media Cetak	181.885.757,00	99.36
38	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung melalui Media Elektronik	686.000.295,00	98.40
	JUMLAH SISA ANGGARAN	863.985.499,00	11.20

Dari tabel di atas, dapat diterangkan bahwa sisa anggaran merupakan akumulasi antara pagu anggaran dikurangi realisasi anggaran. Dalam hal ini realisasi anggaran hanya diakui sesuai jumlah uang yang telah dipertanggungjawabkan dan disahkan, tidak termasuk jumlah sisa dana yang disetorkan kembali ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran.

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Secara umum permasalahan (hambatan dan kendala) yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan operasional kegiatan selama tahun anggaran 2017 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana penunjang, yaitu: ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Belum tersedianya data base pendukung yang komprehensif sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan sehingga ketergantungan akan penyediaan data kepada unit kerja lain masih sangat tinggi;
3. Terbatasnya jumlah personil/pegawai, merupakan kondisi paradoks yang dihadapi, dengan merujuk pada tugas pokok dan fungsi guna memenuhi kebutuhan pelayanan dikalangan pemerintahan dengan penggunaan TIK khususnya dalam hal koordinator perencanaan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara teknis di bidang komunikasi dan informatika.

Menyikapi kondisi internal maupun eksternal diatas, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada disamping penambahan kekurangan fasilitas kerja secara bertahap terus dilakukan dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran yang telah disediakan. Keterbatasan sumber daya (scarcities) harus disikapi dengan arif, dan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dalam pengelolaannya agar tidak terjadi disefisiensi atau anggaran yang mubazir;
2. Melakukan pengembangan teknologi informasi yang tersedia dalam rangka mempermudah akses untuk memperoleh data yang diperlukan dan meningkatkan koordinasi antar instansi baik di dalam maupun di luar lingkungan pemerintah daerah;
3. Melakukan optimalisasi pekerjaan yang sifatnya mendesak berdasarkan urutan skala prioritas serta tingkat urgensinya;
4. Mengusulkan penambahan pegawai baik melalui rekrutmen dan pindahan dari unit kerja lain, yang memiliki kemampuan memadai yang sesuai dengan kebutuhan. Secara umum Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unit kerja yang membutuhkan pegawai dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan aparatur melalui latihan dan pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyiasati minimnya pegawai.

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara intensif untuk mengurangi kesalahan yang terjadi karena adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah, aparatur diikutsertakan dalam bimbingan teknik (bintek) dan diklat pengelolaan keuangan daerah baik yang diselenggarakan oleh daerah maupun pusat;
6. Memberikan telaahan dan saran serta masukan kepada pimpinan tentang perlunya menyusun peraturan mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan terintegrasi (komprehensif) yang dapat digunakan dan diterima secara umum.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi SKPD

Pemerintah Daerah terdiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tupoksi masing-masing dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan-kegiatan dan transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja dalam bentuk laporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standard akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara internal dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi.

Pada Pemerintah Daerah setiap OPD harus diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi lainnya. Untuk itu masing-masing OPD mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan OPD.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrument untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan Kebijakan Akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa yang melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat, kapan dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

Berikut prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan yaitu:

1. Basis akuntansi (accounting basis);
 - a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
 - b. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RekeningKas Umum Daerah atau entitas pelaporan
 - c. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian.

2. Nilai historis;
 - a. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan SKPD.
 - b. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
3. Realisasi;
 - a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
 - b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against evenue principle) dalam akuntansi pemerintahan tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial
4. Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.
5. Periodisitas;
 - a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas SKPD perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
 - b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.
6. Konsistensi;
 - a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
 - b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Pengungkapan lengkap;

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Penyajian wajar

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai pelaporan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

1. PENDAPATAN - Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. BELANJA - Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Kasda, Khusus melalui bendahara Pengeluaran, pengeluaran belanja terjadi pada Saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.
3. ASET - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya,

Dalam pengertian Aset ini tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan , Aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

4. KEWAJIBAN - Kewajiban adalah utang yang timbul dar peristiwa masa lalu. kewajiban pada OPD berupa kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, perhitungan Pihak Ketiga (PFK, serta utang jangka pendek lainnya.
5. EKUITAS DANA - Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas Dana Diinventasikan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada OPD.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan yang ditetapkan oleh peraturan Kepala Daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah Daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintah yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Proses penyusunan kebijakan akuntansi harus melibatkan lintas fungsi maupun OPD, tidak hanya fungsi akuntansi.

Sistem Akuntansi Pemerintah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Sistem akuntansi OPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan OPD.

OPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah). Oleh karena itu, OPD wajib menyelenggarakan SA-OPD untuk menghasilkan laporan keuangan OPD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing–Masing Pos–Pos Pelaporan Keuangan OPD

5.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan merupakan istilah yang sering ditemui dalam proses akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Definisi pendapatan dapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Sedangkan pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah, sehingga tidak terdapat transaksi pada pos pendapatan.

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan belanja dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran kepada Pemegang Kas diakui pada saat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat 1, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari

1) Belanja Tidak Langsung;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat 2 dijelaskan bahwa, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pasal 37 kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja subsidi yang terdiri dari : (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Bunga, (iii) Belanja subsidi, (iv) Belanja Hibah, (v) Belanja Bantuan Sosial, (vi) Belanja bagi Hasil, (vii) Bantuan Keuangan, (viii) Belanja Tak Terduga.

Besarnya anggaran Belanja Tidak Langsung yang dikelola Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp. 6.637.155.057,00-** yang terdiri dari :

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2017 Belanja Pegawai/Personalia Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang direncanakan dalam rangka mengantisipasi kekurangan jumlah plafond anggaran sebagai akibat adanya penambahan pegawai baik melalui pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, maupun pengisian jabatan struktural.

1.1.1. Gaji dan Tunjangan

Dalam APBD Tahun Anggaran 2017 pagu dana Gaji dan Tunjangan yang disediakan untuk Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar **Rp. 3.224.875.057,-** Realisasi penyerapan dana ini hingga tahun 2017 mencapai sebesar **Rp. 2.944.284.974,-** atau **91.29 %** dari total pagu dana Gaji dan Tunjangan yang direncanakan. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 280.590.083,-** atau **8.71 %** dari total anggaran Gaji dan Tunjangan.

1.1.2. Tambahan Penghasilan PNS

Plafond anggaran Tambahan Penghasilan PNS yang dialokasikan untuk Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang tercantum dalam anggaran induk adalah sebesar **Rp. 3.412.280.000,-** dan hingga tahun 2017 realisasi jumlah anggaran yang terserap adalah sebesar **Rp. 2.725.103.000,-** atau **79.86 %**. Pada rekening Tunjangan Tambahan Penghasilan terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 687.177.000,-** atau **20.14 %** dari total anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan setelah mengalami perubahan.

2) **Belanja Langsung;**

Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen Belanja Langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat 3 sebagaimana perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkaitan pasal diatas, pada pasal 50 dijelaskan bahwa kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dalam pasal 54 dijelaskan bahwa belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

2.1. **Belanja Pegawai**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 51 dijelaskan bahwa belanja pegawai merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2017 alokasi Belanja Langsung Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk belanja pegawai adalah sebesar **Rp 2.143.145.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 2.086.090.000,-** atau **97.34.%**. Dari total anggaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 57.055.000,-** atau **2.66 %**.

2.2. **Belanja Barang dan Jasa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 52 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran/pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp. 5.798.379.645,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.284.362.688,-** atau **91.14 %**. Dari total anggaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 514.016.957,-** atau **8.86 %**.

2.3. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Alokasi anggaran Belanja modal Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp 1.769.188.155,-** dengan realisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar **Rp. 1.476.274.613,-** atau **83.44 %**. Dari total anggaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 292.913.542,-** atau **16.56 %**.

5.1.3. Pendapatan LO

Pendapatan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Pendapatan Lain-lain Yang sah

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pendapatan realisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah, sehingga tidak terdapat transaksi pada pos pendapatan.

5.1.4. Beban

Jenis dan Klasifikasi Beban berdasarkan SAP Menurut PP No.71 Tahun 2010, Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban atas pemakaian aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau atas barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Bunga

• Beban Subsidi Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

• Beban Hibah Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah dapat didefinisikan sebagai "transfer yang dibuat pada kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah yang membuat transfer memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah atau tidak untuk melakukan transfer, kondisi harus dipenuhi, jika ada, berapa banyak yang akan ditransfer dan kepada siapa.

- Beban Bantuan Sosial
- Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi di tahun 2017 sebesar **Rp 2.666.182.098,-**. Akumulasi penyusutan akhir tahun 2017 sebesar **Rp 11.822.669.202,-** di kurangi Akumulasi penyusutan awal tahun 2016 sebesar **Rp 9.294.791.928 ,-** . Selisih dari perhitungan akumulasi penyusutan tersebut sebesar **Rp 138.304.824,-** , selisih tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan aset **Rp 124.039.656,-** ditambah dengan akumulasi amortisasi/ penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp 15.268.460,-** dikurangi dengan akumulasi amortisasi/ penyusutan 1 Januari 2017 sebesar **Rp 1.003.292,-**.

5.1.5 Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan Aset Non-Lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam

kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non-Lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Secara garis besar Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan Aset Tetap sebesar **Rp. 807.239.571,-** dari hasil perhitungan Aset Tetap tahun 2017 sebesar **Rp 21.475.248.985,-** dikurangi Aset Tetap tahun 2016 sebesar **Rp 20.650.009.411,-**. Hal ini dapat dimasukkan sebagai penambah kekayaan daerah dan mempunyai manfaat serta nilai ekonomis dimasa depan. Adapun rincian jumlah penambahan Aset Tetap tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

1. Tanah

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Tanah Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 032/99/I/2017 tanggal 24 September 2017, Mutasi dari Biro Pemerintahan sebesar **Rp. 11.172.515,-** dan kapitalisasi biaya sertifikat sebesar **Rp. 9.005.420** berdasarkan BA Koreksi Nomor : 590/051/I/2017 tgl 29/12/2017.

2. Peralatan dan Mesin.

Pada tahun 2017 ada penambahan aset yaitu Belanja Modal pengadaan Alat-alat Angkutan Minibus Roda 4 berdasarkan kontrak nomor : 08/SPK/P-MOBIL/DISK OMINFO/2017 tanggal 17 Maret 2017 sebesar **Rp 183.900.000,-**.

3. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Pada tahun 2017 ada penambahan aset yaitu Belanja Modal sebesar **Rp 844.344.613,00** dan mutasi alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar **Rp 44.621.565,00** (terlampir) serta adanya reklasifikasi (Perubahan Kebijakan Akuntansi) sebesar **Rp 242.425.592,-**

4. Alat-alat Studio dan Komunikasi

Pada tahun 2017 ada penambahan aset yaitu Belanja Modal sebesar **Rp 52.250.000,-** dan adanya reklasifikasi (Perubahan Kebijakan Akuntansi) sebesar **Rp 95.583.950,-** sehingga pada tahun 2017, Aset Tetap Alat alat Studio dan Komunikasi ada penurunan sebesar **Rp 43.333.950,-** .

Pada tahun 2017 terdapat penghapusan aset senilai **Rp 94.320.000,-** yang merupakan aset Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1364/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

Berupa Aset Lain-lain dari Daftar Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

Tabel 5.1. Rincian Aset Tetap Tahun Anggaran 2017

No	URAIAN	JUMLAH		SELISIH
		TAHUN 2017	TAHUN 2016	BERTAMBAH/BERKURANG
1.	Tanah	20.132.935	-	20.132.935
2.	Alat-alat besar	7.514.250	7.514.250	-
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.986.850	6.986.850	-
4.	Alat-alat Angkutan	1.824.586.597	1.640.686.597	183.900.000
5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	9.666.140.333	9.019.599.747	646.540.586
6.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	6.429.747.500	6.473.081.450	(43.333.950)
7.	Bangunan Gedung	3.357.640.517	3.357.640.517	-
8.	Bangunan dan Irigasi	134.000.000	134.000.000	-
9.	Instalasi	10.500.000	10.500.000	-
10.	Jaringan	-	-	-
	JUMLAH	21.457.248.982	20.650.009.411	807.239.571

Sumber : Neraca Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan Aset Tak Berwujud sebesar **Rp 395.780.000,00** yaitu pengadaan Perangkat Lunak Sistem Operasi pada Tahun Anggaran 2017. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2017 terjadi Amortisasi yaitu pengurangan nilai aktiva tak berwujud sebesar **Rp 15.268.460,00**. Neraca untuk Aset Lainnya pada Aset Tak Berwujud sebesar **Rp 404.590.540,00** yaitu di peroleh dari Aset Tak Berwujud tahun 2017 sebesar **Rp 395.780.000,00** di kurangi Amortisasi periode Januari sampai dengan Desember 2017 sebesar **Rp 15.268.460,00** dan di tambah Aset Tak Berwujud tahun 2016 sebesar **Rp 24.079.000,00**.

Pada Aset Lain-Lainnya pada tahun 2017 berdasarkan Neraca per 31 Desember 2017 sebesar **Rp 345.311.200**, yaitu selisih Aset Lain-lainnya tahun 2016 berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016 sebesar **Rp 545.391.200** dan Aset Lain-lainnya tahun 2017. Pada Tahun 2017 terdapat penghapusan

aset senilai **Rp 94.320.000,-** yang merupakan Aset Lain-lain Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1364/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dan reklasifikasi ke ekstra (Perubahan Kebijakan Akuntans) Aset Tetap Rusak Berat sebesar **Rp 105.760.000,00.**

5.1.6 Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekwensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dapat dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

5.1.7 Ekuitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dikelompokkan sebagai berikut :

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek;

Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan definisi dan jenis ekuitas dana diatas, Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2017 mendapat tambahan nilai total kumulatif Ekuitas Dana Investasi dalam Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi mencakup jumlah uang sebesar **Rp. 807.239.571,-** sehingga total ekuitas dana yang diinvestasikan ke dalam Aset Tetap sebesar **Rp. 21.457.248.982,-** yang merupakan penjumlahan Tahun 2016 dengan Tahun 2017.

Sehingga aset Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar **Rp 21.457.248.982 ,,-**.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD

Bagian ini menjelaskan beberapa informasi non keuangan yang tidak tergambar dalam bagian manapun dari catatan atas laporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan pengguna laporan mengetahui lebih jauh kondisi riil lingkup OPD selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya memiliki implikasi terhadap proses penatausahaan maupun pengelolaan keuangan OPD. Oleh karena itu proses penyusunan laporan keuangan mengalami beberapa kendala, sehingga keberlanjutan komitmen dan kontijensi yang disajikan dalam neraca OPD perlu dilakukan koreksi dan penataan kembali. Hal ini perlu menjadi perhatian badan yang berwenang agar dapat menyiapkan peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengikat mengenai batasan-batasan nilai/nominal rupiah yang dapat diakui untuk dikapitalisasi dalam aset.
- Penataan kembali personil internal Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2017, hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya mutasi dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan secara signifikan proses pergantian ini sangat mempengaruhi proses pelaksanaan program/kegiatan yang tengah berjalan.
- Realisasi anggaran yang diakui menganut pada jumlah total nilai anggaran yang mampu dipertanggungjawabkan bukan nilai SP2D yang diterbitkan oleh DPPKAD. Hal ini dilakukan karena OPD tidak menerbitkan SPM nihil. Kondisi demikian diakui cukup menimbulkan kegamangan mengingat SP2D yang terbit merupakan transaksi yang terjadi antar kas yaitu kas yang ada di daerah dengan kas yang ada di bendahara, artinya yang menyebabkan berkurangnya kas daerah, digunakan atau tidak oleh OPD tetap mengurangi nilai pada kas di kas daerah. Selanjutnya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh OPD disetor kembali ke kas daerah akan dicatat sebagai penerimaan lain-lain daerah atau akan dimasukkan kembali pada anggaran OPD yang bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Daerah maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Komunikasi dan Informatika diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut yaitu Total Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 tercatat sebesar **Rp 14.516.115.275,- atau 88.80 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 16.347.867.857,-.**

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Demikian catatan atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 yang disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas sektor publik yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan selaku entitas pelaporan. Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, mengingat pembandingan (benchmark) penyusunan catatan atas laporan keuangan

OPD lingkup pemerintah daerah hingga saat ini belum ada. Sehingga kekurangan atau kelemahan tentunya akan sangat beragam, hal ini tergantung dari aspek pemahaman dan sudut pandang setiap pengguna laporan, namun demikian kami telah mengupayakan untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pangkalpinang, 29 Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI

NIP 196409151990021002